

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA KORUPSI KASUS GRATIFIKASI
Studi Kasus No. 3614/Pid. B/2007 di Pengadilan Negeri Surabaya**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh :

IVANIUS TUBA NETO
NPM 0671010096

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2010**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
KORUPSI KASUS GRATIFIKASI**

Studi Kasus No. 3624/Pid. B/2007 di Pengadilan Negeri Surabaya

Disusun oleh :

IVANIUS TUBA NETO
NPM. 0671010096

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Subani, SH. M.si
NIP. 19510504 1983031 001

Fauzul Aliwarman, SH. M, Hum
NPT. 382 020 70221

Mengetahui,
DEKAN

Haryo Sulistiyantoro, SH, MM
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
KORUPSI KASUS GRATIFIKASI
Studi Kasus No. 3624/Pid. B/2007 di Pengadilan Negeri Surabaya

Disusun oleh :

IVANIUS TUBA NETO
NPM. 0671010096

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh tim penguji skripsi
program study ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur

Pada tanggal 09 November 2010

Tim Penguji :

Tanda Tangan,

1. Sutrisno SH, M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

(.....)

2. Subani SH, M.si.
NIP. 19510504 1983031 001

(.....)

3. Haryo Sulistyantoro SH., MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

(.....)

Mengetahui,
DEKAN

Haryo Sulistyantoro SH., MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
KORUPSI KASUS GRATIFIKASI**

Studi Kasus No. 3624/Pid. B/2007 di Pengadilan Negeri Surabaya

Disusun oleh :

IVANIUS TUBA NETO
NPM. 0671010096

**Telah direvisi dan diterima oleh tim penguji skripsi program studi ilmu
Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur**

Pada tanggal 09 November 2010

1. Sutrisno SH, M.Hum. (.....)
NIP. 19601212 198803 1001
2. Subani SH, M.si. (.....)
NIP. 19510504 1983031 001
3. Haryo Sulistyantoro SH., MM. (.....)
NIP. 19620625 199103 1 001

**Mengetahui,
DEKAN**

Haryo Sulistyantoro SH., MM.
NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN SEMINAR SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
KORUPSI KASUS GRATIFIKASI**

Studi Kasus No. 3614/Pid. B/2007 di Pengadilan Negeri Surabaya

Penyusun:

IVANIUS TUBA NETO
NPM. 0671010096

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Subani, SH, M.Si
NIP. 19510504 1983031 001

Fauzul Aliwarman, SH. M, Hum
NIP/NPT. 382 020 70221

Mengetahui
D E K A N

Hariyo Sulistianoro, SH, MM
NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERLINDUNGAN DAN DAMPAK TERHADAP ANAK KORBAN
PEMERKOSAAN

Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya

Penyusun:

SIGIT PURNOMO
NPM. 0671010084

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Pada tanggal 10 Juni 2010

Tim Penguji :


1. Prof. DR. H. Wahyono, SH, MS
NIP/NPT. 35812090278


(.....)

2. Subani, SH, M.Si
NIP. 19510504 198303 1 003


(.....)

3. Drs. H. Warsito, SH, MM


(.....)

Mengetahui
D E K A N

Hariyo Sulistianoro, SH, MM

NIP. 19620625 199103 1 001
HALAMAN REVISI SKRIPSI

**PERLINDUNGAN DAN DAMPAK TERHADAP ANAK KORBAN
PEMERKOSAAN**

Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya

Penyusun:

SIGIT PURNOMO
NPM. 0671010084

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Pada tanggal 10 Juni 2010

Tim Penguji :

1. Prof. DR. H. Wahyono, SH, MS
NIP/NPT. 35812090278

()

2. Subani, SH, M.Si
NIP. 19510504 198303 1 003

()

3. Drs. H. Warsito, SH, MM
NIP/NPT

()

Mengetahui
D E K A N

Hariyo Sulistianoro, SH, MM
NIP. 19620625 199103 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sang pemberi nafas hidup yang telah melimpah rahmat dan karunianya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Skripsi ini juga dimaksudkan sebagai wahana untuk menambah wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Di samping itu juga diharapkan dapat memberikan bekal tentang hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmunya, demi mengadakan pembaharuan bagi penegakan hukum dimasa yang akan datang.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro, SH,MM selaku Dekan Fakultas Hukum.
2. Bapak Prof. Dr. H. Wahyono, SH selaku dosen pembimbing utama yang memiliki empati terhadap penyusun.
3. Bapak Fauzul Aliwarman, SH.M,Hum selaku dosen pembimbing pendamping yang meluruskan kesalahan-kesalahan penyusun.
4. Bapak Haryo Sulistiyantoro, SH,MM selaku Wadep I Fakultas Hukum.
5. Bapak Sutrisno, SH, M.Hum selaku Wadep II Fakultas Hukum sekaligus sebagai dosen wali penyusun.

6. Bapak Subani SH, MSi, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum.
7. Bapak I Nyoman Gede Wirya, SH, MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atas bantuan serta kerjasamanya.
8. Kedua orang tua, yang telah memberikan doa dan dukungannya sehingga peneliti dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat penyusun anak-anak "Clan B" Bajawa hip-hop community Chester, Glend, Gume, Pato, Shalton, teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum khususnya Leny Eka N., Reni Pristiyan, Doni Eko S., Fajar Amin, Wahib Syarif, Putu Satria D., Rudi Setiawan, Ricky Herdian, Ari Handoko, Rey Kristiansyah, Mershinta Kamega A, Sigit Purnomo, para anak-anak kantin dan teman-teman yang lain yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu dan memberikan saran sebagai masukan di dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penyusun harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan penelitian selanjutnya, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, 26 Oktober 2010

Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAK	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.5 Kajian Pustaka	6
1.5.1 Tinjauan tentang Pidana	5
1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana	6
1.5.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	7
1.5.1.3 Tempat dan Waktu Tindak Pidana	9
1.5.2 Tinjauan tentang Korupsi	9
1.5.2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	9
1.5.2.2 Pengertian Gratifikasi	12
1.5.2.3 Faktor Penyebab Korupsi	14
1.5.2.4 Ciri-ciri Korupsi	15
1.5.2.5 Subjek Delik Korupsi	16
1.5.2.6 Pengertian Pegawai Negeri	16
1.5.2.7 Korban Tindak Pidana Korupsi	17
1.5.2.8 Triptologi Korupsi	17
1.5.3 Tinjauan tentang Putusan Hakim	18
1.5.3.1 Macam-macam Putusan Hakim	18

1.5.5	Tinjauan tentang Pemidanaan	20
1.5.5.1	Pengertian Sanksi	20
1.5.5.2	Pola Jenis Sanksi Pidana dan Tindakan	22
1.5.5.3	Perbedaan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan	23
1.6	Metode Penelitian	24
1.6.1	Pendekatan Masalah	24
1.6.2	Sumber Bahan Hukum	25
1.6.3	Metode Pengumpulan Data	26
1.6.4	Analisis Data	26
1.6.5	Lokasi Penelitian	27
1.6.6	Waktu Penelitian	27
1.6.7	Jadwal Kegiatan	28
1.6.8	Anggaran Penelitian	29

BAB II PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

(GRATIFIKASI) KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL SURABAYA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA

30

2.1	Kejadian Perkara Menurut Resume No. Pol : LP/712/VIII/ 2007/Biro Ops, Tanggal 13 Agustus 2007	30
2.2	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Korupsi	31
2.3	Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Korupsi	32
2.4	Pembelaan terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Korupsi	35
2.6	Pemeriksaan terhadap Saksi dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi	35
2.7	Alasan Kasus ini Masuk Dalam Kategori Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi	36

BAB III PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERJADI DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA DENGAN NOMOR PERKARA 3614/PID.B/2007/PN.SBY.....	38
3.1 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Terhadap terdakwa Pelaku Tindak Pidana Korupsi	38
3.2 Alasan Majelis Hakim Menjatuhkan Pidana Penjara dan Sanksi Denda TerhadapTerdakwa.....	40
3.3 Perbandingan Sanksi yang Dijatuhkan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi oleh Pengadilan Negeri Surabaya dan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.....	43
3.3.1 Hal-Hal yang Memberatkan	45
3.3.2 Hal-Hal yang Meringankan	45
3.4 Kesesuaian Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus ini Sesuai dengan Undang-Undang tindak Pidana Korupsi	46
BAB IV PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Ikhtisar Putusan
Lampiran 2	Sampul Berkas Perkara
Lampiran 3	Resume dengan No. Pol. LP/712/12/VIII/2007/Biro Ops, tanggal 13 Agustus 2007
Lampiran 4	Putusan Pengadilan Negeri Surabaya
Lampiran 5	Surat Keterangan Penelitian di Pengadilan Negeri Surabaya oleh Pengadilan Tinggi Surabaya

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR**

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Ivanius Tuba Neto
NPM : 0671010096
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 10 Oktober 1988
Program Studi : Strata 1 (S1) Ilmu Hukum
Judul Skripsi :

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
KORUPSI KASUS GRATIFIKASI**

Studi Kasus No. 3624/Pid. B/2007 di Pengadilan Negeri Surabaya

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kasus kejahatan tindak pidana korupsi Kepala Badan Pertanahan Kota Surabaya masuk dalam jenis tindak pidana korupsi gratifikasi dan apakah sanksi yang diberikan oleh Majelis Hakim Surabaya sesuai dengan undang-undang tindak pidana korupsi dan kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian Hukum Normatif yakni dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pengumpulan data Hukum Primer yaitu bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, data Sekunder bahan yang erat hubungannya dan membantu dalam menganalisis bahan Hukum Primer, putusan hakim dan rancangan Undang-Undang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan tehnik *library research* yaitu metode pengumpulan data melalui telaah kepustakaan berupa buku/literatur dengan berdasar pada data Sekunder, sehingga dapat menjelaskan permasalahan yang ada secara lebih rinci. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kasus kejahatan tindak pidana korupsi Kepala Badan Pertanahan Kota Surabaya masuk dalam jenis kejahatan tindak pidana korupsi gratifikasi sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaan dan jabatannya dalam proses pengeluaran sertifikat tanah dan sanksi yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Surabaya masih sangat ringan dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa yang mungkin saja tidak memberikan efek jera bagi seorang pelaku tindak pidana korupsi.

Kata kunci : *Korupsi, Gratifikasi, Undang-undang tindak pidana korupsi*

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruhan lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebaskan terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya. Hal ini sangat merugikan negara dan menghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi secara terus menerus dalam waktu yang lama, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas hukum dan peraturan perundang-undangan oleh warga negara. Perasaan tersebut memang telah terlihat semakin lama semakin

menipis dan dapat dibuktikan dari banyaknya masyarakat yang ingin melakukan aksi main hakim sendiri kepada pelaku tindak pidana di dalam kehidupan masyarakat dengan mengatasnamakan keadilan yang tidak dapat dicapai dari hukum, peraturan perundang-undangan dan juga para penegak hukum di Indonesia.

Bangsa Indonesia yang sedang giat dalam melaksanakan reformasi pembangunan sangat membutuhkan suatu kondisi yang dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu kondisi tersebut adalah penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan jiwa reformasi. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Sumber kejahatan korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat modern dewasa ini, sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya. Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penaggulangan maupun pemberantasannya.

Undang-undang korupsi dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas korupsi. Politik kriminal merupakan strategi penanggulangan korupsi yang melekat pada undang-undang korupsi. Mengapa dimensi politik kriminal tidak berfungsi, hal ini terkait dengan sistem penegakan hukum di Negara Indonesia yang tidak egaliter. Sistem penegakan hukum yang berlaku dapat menempatkan koruptor tingkat tinggi di atas hukum. Sistem penegakan hukum yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini diperparah dengan adanya lembaga pengampunan konglomerat korup hanya dengan pertimbangan selera, bukan dengan pertimbangan hukum.

Kasus yang akan penulis teliti, berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa pelaku tindak pidana korupsi HM. Khudlori SH. Mhum., yang menjabat sebagai kepala Badan Pertanahan Surabaya yang secara sah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam hal ini tindak pidana korupsi gratifikasi yang dikhususkan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan jelas menyebutkan bahwa, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi dalam hal gratifikasi, dihukum paling singkat 4 (empat) tahun penjara dan paling lama 20 (dua puluh tahun) penjara dengan denda minimal Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Hal

ini tentu mengakibatkan terjadinya perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Surabaya terhadap terdakwa pelaku tindak pidana korupsi tersebut. Hal yang meringankan apakah yang menyebabkan Majelis Hakim yang menangani perkara ini di Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan yang menurut penulis, putusan ini adalah putusan yang ringan dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana korupsi dan tidak sesuai dengan undang-undang tindak pidana korupsi yang berlaku.

Kesulitan tersebut terjadi dalam proses pembuktian. Hal ini dikarenakan korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi yang memiliki intelektualitas tinggi (*white collar crime*) atau kejahatan kerah putih. Untuk mengungkap perkara korupsi salah satu aspeknya adalah sistem pembuktian yang terletak pada beban pembuktian. Dalam kasus ini penulis ingin meneliti dan mengetahui tentang persidangan kasus tindak pidana korupsi dan kesesuaian penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Apakah kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus ini masuk dalam kategori tindak pidana korupsi gratifikasi dan apakah sanksi yang telah diputuskan tersebut sesuai dengan undang-undang tindak pidana korupsi serta tersebut diputuskan sesuai dengan kejahatan yang dilakukan dan apakah putusan tersebut dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi? Jadi, hal ini yang mendasari penulis melakukan penelitian dengan judul ” **Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kasus Gratifikasi (Studi Kasus No. 3614/Pid. B/2007 di Pengadilan Negeri Surabaya)**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya dalam kasus ini masuk dalam kategori tindak pidana korupsi gratifikasi?
- b. Bagaimana kesesuaian penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan undang-undang tindak pidana korupsi dalam kasus ini?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apakah kasus tindak pidana korupsi Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya termasuk dalam jenis tindak pidana korupsi gratifikasi.
- b. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang tindak pidana korupsi.

1.4 Kegunaan Penelitian.

a. Kegunaan Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam rangka penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan kesesuaian penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

b. Kegunaan Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada lembaga-lembaga hukum terkait dengan penyelesaian perkara tindak

pidana korupsi dan penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi agar mendapatkan efek jera dan kesesuaian sanksi terhadap tindakan yang dilakukan sesuai dengan undang-undang korupsi.

1.5 KAJIAN PUSTAKA

1.5.1 Tinjauan tentang Tindak Pidana

1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹

Abdoel Djamali mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (*Delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.²

Unsur-unsur itu terdiri dari :

1. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
2. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

¹ Kamus Hukum, Bandung, Citra Umbara, 2008, h 493.

² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006, h 175.

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Menurut Abdoel Djamali, syarat- syarat yang harus dipenuhi ialah sebagai berikut :³

1. Harus adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
 - a. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Harus berlawanan dengan hukum.
 - c. Harus tersedia ancaman Hukumannya.

Hari Saherodji mengatakan, bahwa Tindak Pidana merupakan suatu kejahatan yang dapat diartikan sebagai berikut :

1. Perbuatan anti sosial yang melanggar hukum atau undang-undang pada suatu waktu tertentu.
2. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
3. Perbuatan mana diancam dengan hukuman/perbuatan anti sosial yang sengaja, merugikan, serta mengganggu ketertiban umum, perbuatan mana dapat dihukum oleh negara.

1.5.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur Subjektif

- 1) Kesengajaan atau kelalaian
- 2) Maksud dari suatu percobaan atau poding seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Pasal 53 Ayat (1) KUHP

Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena sendiri.

³ Hari Saherodji dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama, 2001, h 28.

- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP

Pasal 340 KUHP

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

- 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Pasal 308 KUHP

Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.

b. Unsur Objektif

- 1) Sifat melawan hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.

Pasal 415 KUHP

Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.⁴

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, h 7.

1.5.1.3 Tempat dan Waktu Tindak Pidana

Tidak mudah untuk menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh hakikat pidana merupakan tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia menggunakan alat yang dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat itu.

Dapat pula terjadi bahwa tindakan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain daripada waktu dan tempat di mana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi, *tempus delicti* adalah waktu di mana telah terjadi suatu tindak pidana sedangkan *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung. Yang dianggap sebagai locus delicti adalah : ⁵

- a. Tempat di mana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh orang yang melakukan perbuatannya.
- c. Tempat di mana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat di mana akibat konstitutif itu telah timbul.

1.5.2 Tinjauan Tentang Korupsi

1.5.2.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi dalam ensiklopedia Indonesia disebutkan sebagai (dari bahasa latin: *corruptio* = penyuapan, *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-

⁵ Evi Hartanti, *ibid*, h 8.

badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harafiah dari korupsi dapat berupa kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran.⁶ Dalam pengertian lain dapat dikatakan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.⁷ Muhammad Ali dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia memberikan pengertian korupsi sebagai berikut :

- a. Korup (busuk; suka menerima uang suap/uang sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).
- b. Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya).
- c. Koruptor (orang yang korupsi).

Secara harfiah, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan membusuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan.

Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas:

⁶ S.Wojowasito-W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Jakarta, Cyperss, 1971.

⁷ S.Wojowasito-W.J.S Poerwadarminta, *Ibid*.

- a. Korupsi atau penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
- b. Korupsi; busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam kamus hukum, yang dimaksud *curruptie* adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Korupsi sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan Bangsa Indonesia, jika dibiarkan begitu saja maka korupsi akan merajalela dan akan menjadi hal biasa dalam perbuatan hidup masyarakat. Ini akan menjadi hambatan utama bagi pemerintah untuk membangun Bangsa Indonesia yang lebih makmur dan jujur.

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Charmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi, *financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt* (manipulasi dan

keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering dikategorikan perbuatan korupsi). Selanjutnya ia menjelaskan *the term is often applied also to misjudgements by officials in the public economies* (istilah ini sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang menyangkut bidang perekonomian umum).

Dikatakan pula, *disguised payment in the form of gifts, legal fees employment, favors to relatives, social influence, or any relationship that sacrifices the public and welfare, with or without the implied payment of money, is usually considered corrupt* (pembayaran terselebung dalam bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial atau hubungan apa saja yang merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan korupsi). Ia menguraikan pula bentuk korupsi yang lain, yang diistilahkan *political corruption* (korupsi politik) adalah *electoral corruption includes purchase of vote with money, promises of office or special favors, coercion, intimidation, and interference with administrative or judicial decision, or governmental appointment* (korupsi pada penelitian umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan administrasi atau keputusan yang menyangkut pemerintahan).⁸

1.5.2.2 Pengertian Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas

⁸ Evi Hartanti, *Ibid*, h 8.

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tetap dianggap terjadi walaupun diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Walaupun batas minimum belum ada, namun ada usulan pemerintah melalui Menfkominfo pada tahun 2005 bahwa dibawah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) supaya tidak dimasukkan kedalam kelompok gratifikasi. Namun hal ini belum diputuskan dan masih dalam wacana diskusi. Dilain pihak masyarakat sebagai pelapor dan melaporkan gratifikasi di atas Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) wajib dilindungi sesuai Peraturan Perundang-undangan No. 71 Tahun 2000. Landasan hukum tindak gratifikasi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 tentang tindak pidana korupsi dimana ancamannya adalah dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, setiap gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri atau penyelenggara negara

dianggap suap, namun ketentuan yang sama tidak berlaku apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

1.5.2.3 Faktor Penyebab Korupsi

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :⁹

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
- b. Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- c. Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
- d. Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.
- e. Tidak adanya sanksi yang keras.
- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi.
- g. Struktur pemerintahan.
- h. Perubahan radikal. Pada sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- i. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat.

⁹ Evi Hartanti, *Ibid*, h 11.

1.5.2.4 Ciri-Ciri Korupsi

Ciri-ciri korupsi dijelaskan oleh Shed Husein Alatan dalam bukunya Sosiologi Korupsi sebagai berikut :¹⁰

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. Seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*).
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
- d. Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

1.5.2.5 Subjek Delik Korupsi

Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bahwa subjek delik terbagi dalam dua kelompok, kedua-duanya jika melakukan perbuatan pidana diancam sanksi. Sanksi pidana yang

¹⁰ Evi Hartanti, *Ibid*, h 10-11.

diberikan, disesuaikan dengan undang-undang tindak pidana korupsi yang berlaku. Kedua subjek atau pelaku delik itu adalah :

- a. Manusia
- b. Koorporasi
- c. Pegawai Negeri
- d. Setiap Orang.

1.5.2.6 Pengertian Pegawai Negeri

Undang-undang pokok Kepegawaian Nomor 18 Tahun 1961. Undang-undang ini sudah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pasal 1 bagaian 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 berbunyi : “pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 2 Ayat (1) KUHP membedakan pegawai negeri atas tiga kelompok yaitu :

- 1. Pegawai negeri sipil.
- 2. Anggota Tentara Nasional Indonesia.

3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa pegawai negeri terdiri dari :
5. Pegawai negeri sipil pusat.
6. Pegawai negeri sipil daerah.
7. Pasal 2 ayat (3) menyatakan disamping pegawai negeri sebagaimana dimaksud pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai tetap.

1.5.2.7 Korban Tindak Pidana Korupsi

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan dari tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya atau orang yang terkena dampak dan kerugian dari perbuatan seseorang atau golongan terhadap dirinya, serta hak dari orang tersebut juga telah dirampas oleh para pelakunya. Korban dari Tindak Pidana Korupsi itu sendiri adalah perorangan, korporasi dan negara yang mengalami kerugian materil.

1.5.2.8 Tipologi Korupsi

Pengembangan tipologi korupsi menurut Vito Tanzi adalah sebagai berikut :¹¹

1. Korupsi transaksi, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan diantara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.
2. Korupsi ekstortif, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi.

¹¹ Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2008, hal 2.

3. Korupsi investif, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa datang.
4. Korupsi nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat.
5. Korupsi otogenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*insiders information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.
6. Korupsi supportif, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan.
7. Korupsi defensif, yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasaan.

1.5.3 Tinjauan tentang Putusan Hakim

1.5.3.1 Macam-Macam Putusan Hakim

Macam-macam putusan hakim dalam persidangan di pengadilan adalah sebagai berikut :¹²

- a. Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili
 Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau penasehat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan). Eksepsi tersebut antara lain dapat memuat bahwa Pengadilan Negeri tersebut tidak berkompetensi (wewenang) baik secara relatif maupun absolut untuk mengadili perkara tersebut. Jika majelis hakim berpendapat sama dengan penasehat hukum maka dapat dijatuhkan putusan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili.
- b. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum

¹² Evi Hartanti, Ibid, hal 56.

Dakwaan batal demi hukum dapat dijatuhkan dengan memenuhi syarat-syarat yang ada. Syarat dakwaan batal demi hukum dicantumkan dalam Pasal 143 Ayat (3).

- c. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima

Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima pada dasarnya termasuk kekurangcermatan jaksa penuntut umum, sebab putusan tersebut dijatuhkan karena :

1. Pengaduan yang diharuskan bagi penuntut dalam delik aduan tidak ada.
2. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa sudah pernah diadili.
3. Hak untuk penuntutan telah hilang karena kadaluarsa (*verjaring*).

- d. Putusan yang menyatakan bahwa tersangka lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan ini dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan :

1. Materi hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana.
2. Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Keadaan istimewa tersebut antara lain :
 - a) Tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP).
 - b) Melakukan di bawah daya paksa (Pasal 48 KUHP).
 - c) Adanya pembelaan terdakwa (Pasal 49 KUHP).
 - d) Adanya ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP).
 - e) Adanya perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

- e. Putusan bebas

Putusan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputuskan bebas. (Pasal 191 Ayat 1 KUHP).

- f. Putusan pemindaan pada terdakwa

Pemindaan dapat dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya. hakim dalam hal ini membutuhkan kecermatan, ketelitian serta kebijakan memahami setiap yang terungkap dalam persidangan. Sebagai hakim harus berusaha untuk menetapkan suatu hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil. Untuk menjatuhkan hukuman yang adil, harus memperhatikan :

1. Sifat tindak pidana.
2. Ancaman hukuman terhadap tindak pidana.
3. Keadaan atau suasana waktu dilakukannya tindak pidana.
4. Pribadi terdakwa.
5. Sebab-sebab melakukan tindak pidana.
6. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan.
7. Kepentingan umum.

1.5.4 Tinjauan tentang Pemidanaan

1.5.4.1 Pengertian Sanksi.

Sanksi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggungan (tindakan-tindakan, hukuman, dsb) untuk memaksa orang menepati perjanjian dan menaati ketentuan perundang-undangan, sedangkan menurut Terminologi Hukum Pidana, sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.¹³

Kamus hukum menerangkan, sanksi adalah akibat dari suatu perbuatan atau suatu reaksi dari pihak lain (manusia atau organisasi sosial) atas suatu perbuatan dari seseorang yang telah merugikan orang atau pihak lain.¹⁴

¹³ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, h. 138.

¹⁴ Kamus Hukum, Bandung, Citra Umbara, 2008, h 429.

Penetapan sanksi dalam suatu tindak pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri.

Sistem penjatuhan sanksi perlu mendapatkan perhatian yang serius, mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Apalagi sering terjadi kecenderungan dalam produk kebijakan legislasi bahwa hukum pidana hampir selalu digunakan untuk menakut-nakuti atau mengamankan bermacam-macam kejahatan yang timbul diberbagai bidang. Fenomena semacam ini member kesan yang seolah-olah dirasakan kurang sempurna, bahkan mungkin hambar bila suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya (sanksinya).¹⁵

Jenis sanksi untuk setiap bentuk kejahatan berbeda-beda, namun yang jelas semua penetapan sanksi dalam hukum pidana harus tetap berorientasi pada tujuan pemidanaan itu sendiri. Sementara di lain pihak, tujuan pemidanaan atau penjatuhan sanksi hingga kini masih menjadi pusat perhatian. Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Victoria, Canada, Gerry A. Ferguson menyayangkan tidak adanya consensus yang jelas mengenai teori pemidanaan yang sebenarnya mendasari tujuan pemidanaan.¹⁶

Dapat disimpulkan sanksi merupakan bagian penting dalam sistem pemidanaan, karena keberadaannya

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *op.cit*, 1998, h 40.

¹⁶ Gerry A. Ferguson, *Criminal Liability and Sentencing Of Corporations*, Surabaya, FH Unair, 1993, h 28.

dapat memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya di jadikan sanksi dalam suatu tindak pidana.

1.5.4.3 Pola Jenis Sanksi Pidana dan Tindakan

Jenis sanksi yang digunakan dalam Konsep KUHP, terdiri dari jenis pidana dan tindakan. Masing-masing sanksi terdiri dari :¹⁷

A. Pidana

- a. Pidana pokok :
 - 1) Pidana penjara.
 - 2) Pidana tutupan.
 - 3) Pidana pengawasan.
 - 4) Pidana denda.
 - 5) Pidana kerja sosial.
- b. Pidana tambahan
 - 1) Pencabutan hak-hak tertentu.
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu dan tagihan.
 - 3) Pengumuman putusan hakim.
 - 4) Pembayaran ganti rugi.
 - 5) Pemenuhan kewajiban ada.
- c. Pidana khusus : pidana mati.

B. Tindakan

- a. Untuk orang yang tidak atau kurang mampu bertanggung jawab (tindakan dijatuhkan tanpa pidana) :
 - 1) Perawatan di rumah sakit jiwa.
 - 2) Penyerahan kepada pemerintahan.
 - 3) Penyerahan kepada seseorang.
- b. Untuk orang pada umumnya yang mampu bertanggung jawab (dijatuhkan bersama-sama dengan pidana) :
 - 1) Pencabutan surat izin mengemudi.
 - 2) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
 - 3) Perbaikan akibat-akibat tindak pidana.
 - 4) Latihan kerja.
 - 5) Rehabilitasi.
 - 6) Perawatan di dalam suatu lembaga.

¹⁷ Barda Narwawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, h248.

2.5.4.3 Perbedaan Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan

Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah. Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggaran. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Atau seperti dikatakan J.E. Jonkers, bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Berdasarkan tujuan, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderita terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku.

Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuan lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pembedaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Masalah.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum. Jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.¹⁸

Pendekatan yang peneliti lakukan ini berdasarkan aturan-aturan dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi, yang diatur sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan penyelesaian

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008, h 87.

tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1946 HUHP.

1.6.2 Sumber Bahan Hukum.

Sumber utama penelitian ilmu hukum normatif adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.¹⁹ Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Data primer diperoleh melalui bahan yang mendasari dan berkaitan dengan penulisan ini, yaitu :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- UU No. 30 Tahun 2003 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

¹⁹ *Ibid*, h 86.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang menjelaskan secara umum mengenai bahan hukum primer, hal ini bisa berupa:

- Buku-buku ilmu hukum;
- Jurnal ilmu hukum;
- Laporan penelitian ilmu hukum;
- Internet dan bahan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data.

Pengkajian ilmu hukum, metode atau cara untuk mengumpulkan data berbeda dengan cara pengumpulan data pada disiplin ilmu lain, perbedaan ini muncul karena apa yang dimaksud dengan data dalam ilmu hukum berbeda dengan makna data pada penelitian ilmu hukum lain. Data yang dimaksud dalam penelitian ilmu hukum Normatif adalah apa yang ditemukan sebagai isu atau permasalahan hukum dalam struktur dan materi hukum positif yang diperoleh dari kegiatan mempelajari bahan-bahan hukum terkait.²⁰

1.6.4 Analisis Data.

Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan

²⁰ *Ibid*, h 166.

apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan aspek yang lain dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh. Disamping memperoleh gambaran secara utuh, ditetapkan langkah selanjutnya dengan memperhatikan dokumen khusus yang menarik untuk diteliti yaitu kasus tindak pidana korupsi. Dengan demikian penelitian menjadi lebih fokus dan tertuju pada masalah yang lebih spesifik.²¹

1.6.5 Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis gunakan dalam penelitian dan pengumpulan data adalah di Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Raya Arjuno No.16-18 Surabaya.

1.6.6 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 3 (tiga) bulan, dimulai dari bulan September sampai dengan November 2010. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April minggu pertama. Tahap persiapan

²¹ *Ibid*, h 174.

penelitian ini, meliputi : penentuan judul penelitian, penulisan proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal. Tahap pelaksanaan penelitian selama 2 bulan terhitung mulai minggu pertama bulan September sampai Oktober minggu terakhir, meliputi : pengumpulan sumber data sekunder, pengolahan dan penganalisaan data. Tahap penyelesaian penelitian selama 1 bulan terakhir pada bulan Oktober, meliputi : kegiatan penulisan laporan penelitian, pendaftaran ujian lisan dan melakukan ujian skripsi.

1.6.7 Jadwal Kegiatan

No.	Jadwal Penelitian	Agustus 2010				September 2010				Oktober 2010				November 2010			
	Minggu ke-	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pembayaran Administrasi																
2.	Pendaftaran Skripsi																
3.	Penentuan Dosen Pembimbing																
4.	Pengajuan Judul																
5.	Acc Judul																
6.	Minta Surat ke Instansi																
7.	Pengajuan ke Instansi																
8.	Mengerjakan BAB I																
9.	Pendaftaran Proposal																
10.	Seminar Proposal																
11.	Revisi Proposal																
12.	Pengumpulan Proposal																
13.	Penelitian																
14.	Mengerjakan Bab II, III, IV																
15.	Pendaftaran Ujian Lisan																
16.	Ujian Lisan																

1.6.8 Anggaran Penelitian

Penelitian ini dibiayai secara pribadi oleh peneliti dan kedua orang tua peneliti. Rincian penggunaan dana adalah sebagai berikut :

1. Biaya tahap persiapan Rp.300.000
2. Biaya tahap pelaksanaan Rp. 200.000
3. Biaya tahap penyelesaian Rp. 500.000

Jumlah semua rincian biaya yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebesar Rp. 1.000.000.-